

BAB II

PROFIL KOTA BATAM, KOTA GIMJE DAN PENEGERTIAN KERJASAMA *SISTER CITY*

Bab sebelumnya menjelaskan sedikit dari latar belakang masalah dan profil dari Kota Batam, dan pada bab ini akan menjelaskan profil Kota Batam dan Kota Gimje, serta menjelaskan pengertian apa itu *Sister City*.

Latar belakang sebuah negara atau kawasan memperkenalkan karakteristik dari kawasan tersebut sehingga sebuah profil mampu menjadi senjata untuk menarik atau menjauhkan minat mitra kerjasama. Dari bab ini penulis memaparkan profil dari Kota Batam dan menjelaskan pengertian kerjasama *sister city*.

A. Profil Kota Batam

Setelah ditetapkannya Pulau Batam menjadi sebuah kota administratif, Batam menjadi kawasan industri terkemuka dan menjadi “kota pencetak dollar”. Sehingga tak mengherankan jika total dari perekonomian Batam, 71,60% nya adalah merupakan kegiatan Industri Pengolahan. Untuk mendukung hal itu semua, Batam berusaha memperluas lahan untuk industrinya. Melalui digabungnya pulau-pulau sekitar seperti Pulau Batam, Tonton, Nipah, Setoko, Rempang, Galang, dan Galang Baru dengan jembatan megah. Bahkan Batam sendiri membagi kawasannya menjadi beberapa bagian; kawasan Industri, kawasan wisata, kawasan penyedia air bersih, dan kawasan yang menjadi pusat kegiatan perdagangan ritel dan pemerintahan. Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan yaitu kecamatan Belakang Padang, Bulang, Galang, Sei Beduk, Segulung, Nongsa, Batam Kota, Batu Aji, Bengkong, Sekupang, Lubuk Baja dan Batu Ampar seluas

1.595 km².¹⁸ Secara geografis wilayah kota Batam mempunyai luas wilayah 1595 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas utara : Selat Singapura
2. Batas Selatan : Kepulauan Riau
3. Batas Timur : Kabupaten Kepulauan Riau
4. Batas Barat : Kabupaten Karimun

Dari segala kemajuan dan kemegahan yang ada pada Batam, menyimpan persoalan-persoalan sosial yang mengikutinya sebagai sebuah konsekuensi industrialisasinya. Kesenjangan sosial antara kawasan berikat yang menjadi konsentrasi industrinya dengan daerah di luarnya (*hinterland*) menjadi tak terelakkan. Selain itu, secara geografis Batam yang dekat dengan Singapura (22 km) menjadikan keduanya saling bekerja sama dalam segitiga Sijori (Singapura-Johor-Riau) pun juga banyak permasalahan. Batam menjadi area transit para TKI yang akan ke luar negeri atau yang dideportasi, Batam menjadi daerah rawan penyelundupan. Bahkan Batam pun tidak luput dari menjamurnya perumahan liar, pelacuran, dan kriminalitas.

Kemajuan yang telah dicapai dan persoalan yang diupayakan untuk berkurang, tak terlepas dari kerja keras Pemda Kota Batam dengan Batam *Industrial Development Authority* (Otorita Batam) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tugas Otoritas Kota Batam sebagai perancang dan pelaksana pembangunan fisik boleh dikatakan sudah menunjukkan hasil. Namun semenjak 1

¹⁸Luas geografis Kota Batam. <https://batamkota.bps.go.id> diakses pada 3 maret 2018

Januari 2001, UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah berlaku, perlu ada aturan jelas dan tegas atas kewenangan antara Pemda Batam dan Otoritas kota Batam. Tentunya pihak Pemda Kota Batam tidak ingin sebagai “penguasa” di daerahnya sendiri namun tidak memiliki kewenangan.

1. Sejarah

Pulau Batam dulunya bernama Pulau Batang, sebagaimana terdapat pada peta pelayaran VOC pada tahun 1675 yang masih tersimpan di perpustakaan Leiden Belanda. Menurut sejarah, Batam pertamakali dihuni oleh orang selat atau orang laut. Diperkirakan merekalah suku asli Batam yang memiliki ras Melayu. Orang selat ini menghuni Batam pertama kali pada 231M yang pada saat itu di sebut pulau ujung pada zaman Singapura. Nama Batam yang berasal dari pulau Batang ini menurut legenda diambil karena hampir seluruh pantai Batam yang menghadap ke laut Cina selatan ditumbuhi batang pohon jenis tertentu yang khas. Pohon tersebut dibutuhkan oleh para pelaut dan sering singgah di pulau Batam untuk mengambilnya. Selain itu terdapat juga versi lain cerita nama pulau Batam yang berasal dari “Batang” yang berarti “jembatan” atau “jalur penghubung antar pulau Bintang (Bintan), Bulang (Bulan), Lingga, dan pulau-pulau lainnya termasuk Singapura dan Johor. Versi lain dari perkampungan terawal dari Batam, bahwa Batam berasal dari singkatan Batu Ampar.

Nama Batam banyak disebut dalam catatan perjalanan bangsa asing dan dokumen sejarah, termasuk dalam Traktat London 1824 dan dokumen kerajaan Riau-Lingga. Berdasarkan catatan Cina, Batam dan pulau sekitarnya

sudah dihuni manusia sejak 231 M. Sebagaimana Temasek (Singapura) yang pada masa itu disebut Pulau Ujung (karena berada di ujung Tanah Semenanjung), pesisir kepulauan Batam dihuni oleh Suku Laut atau disebut juga orang selat. Sedangkan di daratan di huni oleh suku pedalaman seperti suku Sakai dan suku Jakun. Kawasan Kepulauan Riau dan Tanah Semenanjung, termasuk kepulauan Batam, pernah menjadi wilayah kerajaan Melayu (Johor, Riau, Lingga, Pahang, dan seluruh daerah taklukannya) dan kerajaan Riau-Lingga pada awal kemaharajaan Melayu (pasca runtuhnya Melaka). Kepulauan Batam menjadi wilayah langlang laut (pengawalan) Hang Nadim. Laksamana Melayu dipercaya sejak masa Sultan Mahmud Syah I dan Sultan Alauddin Riayat Syah II itu mendapat kepercayaan sebagai raja laut atau langlang laut yang bertanggung jawab membendung pengaruh bangsa asing (terutama Portugis) di kepulauan Melayu, dan kepulauan Melayu yang di maksud termasuk Pulau Batam dan sekitarnya.

Mengacu berbagai sumber, Edi Sutrisno menyebutkan, Penduduk Melayu yang bermukim di kepulauan Batam berasal dari Tanah Semenanjung Melayu (Malaysia dan Singapura sekarang) serta Jambi. Sebagaimana diketahui,, seputar abad ke-17 M, pernah terjadi perang antara Johor dan Jambi dan tidak tertutup kemungkinan para tentaranya banyak yang kemudian tinggal dan menetap di kepulauan Melayu, termasuk kawasan Batam. Sementara pendapat yang mengatakan berasal dari Tanah Semenanjung Melayu tak terbantahkan lagi, karena kepulauan Batam

berdepan-depan langsung dengan kawasan itu¹⁹. Dalam abad ke-17 M sudah ada penduduk yang mendiami kawasan pesisir Bukit Layang, terdiri dari Suku Sakai yang hidup dengan mencari minyak kayu, damar, dan rotan. Sedangkan pada 1790, penduduk asli bernama A'lama yang beristrikan orang Melayu, membuka wilayah yang kemudian bernama kampung Setenga. Pada 1813 dibuka pula perkampungan kelak yang bernama Patam yang didiami orang Melayu dari Pahang. Sementara itu, pada 1817 telah ditemui penduduk etnis China dikawasan Sei Panas. Etnis China juga banyak yang bermukim di kawasan lain di kepulauan Batam seperti Duriangkang, Mukakuning, dan Tanjungcang, Waheng, dan sebagainya. Pada 1820 kawasan Teluk Lengong telah dihuni penduduk Melayu yang dipimpin Wak Gendut²⁰. Di masa Kerajaan Lingga-Riau atau Riau-Lingga (1819-1913), telah terjadi perpindahan besar-besaran orang Melayu ke Batam dan diantara mereka membuka perkampungan yang kelak dikenal sebagai Nongsa, Tanjunguma, Tanjungpantun, Tanjungriau, Tanjungsengkuang, Telagapunggur, Tanjungbemban, Kampung Belian, Kampung Bagan, Labuan Garap, dan sebagainya. Yang berpindah dan membuka perkampungan di Batam tersebut umumnya kaum kerabat kerajaan. Selain sebai nelayan, mereka juga menanam gambur dan lada (hitam). Seiring itu, orang China juga banyak yang datang ke Batam serta bekerja di lading-ladang gambir dan lada.ada juga yang berkebudan karet dan durian. Kemudian

¹⁹ Profil dari kota Batam. <https://batam.go.id/profil/perekonomian> diakses pada 3 maret 2018

²⁰ Sejarah dari Kota Batam. <https://batam.go.id/profil/perekonomian> diakses pada 3 maret 2018

banyak yang berdagang serta membuka usaha pelayaran. Banyak tokoh dalam korpus sejarah Melayu yang telag diabadikan menjadi nama tempat atau nama jalan di bekas wilayah Kemaharajaan Melayu, baik di Malaysia, Singapura, Brunei Darusslama, dan Indoensia, apalagi di Provinsi Kepulauan Riau dan Riau. Khusus di Kota Batam, pengabdian nama tokoh dalam sejarah Melayu dalam sejarah Melayu di antara yang terpenting dapat disenaraikan sebagai berikut ini:

1. Bandara Hang Nadim
2. Stadion Temenggung Abdul Jamal.
3. Gedung Nong Isa.
4. Bumi Perkemahan Raja Ali Kelana.
5. Dataran Engku Putri.
6. RS. Engku Embung Fatimah.

2. Kependudukan

Sejak pulau Batam dan beberapa pulau di sekitarnya dikembangkan oleh pemerintah Indonesia menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata serta dengan terbentuknya. Kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan dimana dari hasil sensus penduduk rata-rata pertahunnya selama periode 2000-2013 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 8%.²¹

²¹Hasil dari sensus kependudukan dari kota Batam dari Tahun 2000-2013. <https://batamkota.bps.go.id> diakses pada 3 maret 2018

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jari)				Jumlah KK		Tingkat Pertumbuhan			Kepadatan Penduduk (orang/m ²)			
		Tahun				Tahun		Tahun			Tahun			
		2009	2010	2011	2012	2010	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Dakong Padang	6	24.527	23.963	24.405	26.184	6.132	5.988	6.117	-0,024	0,023	0,039	5.441	5.535	5.721
Stu Ampar	4	10.675	53.934	97.405	101.035	22.905	23.473	24.306	0,026	0,038	0,046	148.938	154.217	166.861
Bengkong	4	18.214	11.074	130.036	127.744	24.054	2.209	35.825	-0,072	0,009	0,049	11.806	128.033	136.188
Lubuk Baja	5	57.565	102.803	109.438	114.003	24.011	26.205	27.269	0,053	0,063	0,0425	228.456	243.195	261.540
Estim Kota	6	121.309	136.902	152.035	176.516	30.327	34.031	38.284	0,128	0,141	0,1473	87.858	95.041	104.024
Sri Setia	4	103.646	116.448	123.188	124.612	27.262	28.867	30.719	0,063	0,0669	0,0385	66.329	70.829	72.800
Nanyas	4	30.145	36.192	47.737	46.136	12.336	14.045	15.424	0,124	0,0969	0,0715	10.136	11.116	11.940
Sekupang	7	116.526	146.040	136.575	146.927	24.952	31.507	34.146	0,067	0,0839	0,0904	59.636	64.607	70.481
Sungailong	5	142.026	166.409	185.238	188.317	36.632	38.115	42.500	0,093	0,084	0,1362	43.736	47.566	52.617
Estim Aji	4	103.562	107.895	113.036	121.834	26.486	26.084	28.276	0,092	0,0475	0,1617	69.096	53.304	62.216
Galang	6	11.501	11.905	12.223	12.687	2.980	2.935	3.056	-0,0163	0,0267	0,0380	1.209	1.363	1.475
Galang	8	1.938	15.110	15.842	17.459	407	2.748	3.961	6,6415	0,0438	0,1026	0,935	0,925	1,025
Total		976.728	967.035	1.137.884	1.235.631	242.480	250.208	264.474						

Gambar 2.1 hasil sensus penduduk Kota Batam sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil 2013

3. Perekonomian

Laju pertumbuhan ekonomi Batam tiap tahun terus meningkat bahkan ketika pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,8% di tahun 2000, Batam sudah mencapai 7,6% atau meningkat 6,38% dari tahun sebelumnya. Hal ini tak lepas dari investor yang menanamkan modalnya. Diketahui bahwa 47% investor berasal dari swasta domestik, 33% merupakan swasta asing dan sisanya yaitu 20% berasal dari pemerintah. Sekitar 50% investor menanamkan modalnya di sektor industri yang didominasi berorientasi ekspor (70%), disusul sektor perdagangan, jasa perumahan, pariwisata, dan pertanian. Hal inilah yang menjadi acuan kota Batam dalam menjalin kerjasamanya dengan kota Batam yang memiliki *track record* dalam bidang ekonominya. Dalam hal tersebut menjadi nilai lebih dari kota Batam dalam menjalin kerjasama '*sister city*' dengan Kota Gimje.

Kota Batam mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi nasional maupun daerah. Dimana posisi Kota Batam yang begitu strategis dengan negara industri baru yaitu Singapura, membuat Kota Batam sangat berpotensi untuk menampung luapan

ekonomi dari negara Singapura yang tergolong maju dalam bidang industri. Berbagai sektor penggerak ekonomi dari Kota Batam meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan ujung tombak perekonomian Kota Batam. Nilai ekonomi Kota Batam memang tergolong memiliki laju perkembangan dari laju perkembangan perekonomian nasional. Diperkirakan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Batam sekitar 8.39%.²²

Pemerintah Kota Batam selaku pelaksana pembangunan Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, mempunyai komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan.

4. Pertanian

Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Batam berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat dengan keadaan tanahnya yang subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Luas lahan pertanian sawah pada tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Riau seluas 453 ha, meningkat drastis sebesar 225%, dari 453 hektar di tahun 2011 menjadi 1.021 hektar pada tahun 2012. Dalam

²²Perekonomian Kota Batam. <https://batam.go.id/profil/perekonomian> diakses pada 3 maret 2018

sektor pertanian kepulauan Riau yang dikatakan Kota Batam memiliki keuntungan dalam segi letak posisi yang strategis yaitu di jalur perdagangan. Akan tetapi untuk segi pertanian di Kota Batam adalah salah satu kekurangannya yang menjadikan bagian dari alasannya bekerjasama dengan Kota Gimje dalam memaksimalkan hasil pertanian di Kota Batam. Daerah Sei- Temiangyang menjadi harapan lahan pertanian Kota Batam yang berada di kecamatan Batu Ampar.

5. Pariwisata

Pariwisata yang menjadi salah satu senjata dalam berkembangnya suatu daerah dengan memanfaatkan dan mengembangkan objek-objek wisata agar menjadi daya tarik dari wisatawan. Seperti dengan kota Batam yang terletak di lokasi yang sangat strategis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ditambah dengan posisinya berada di jalur Internasional yang menjadikan pulau Batam unggul dalam jalan masuknya para wisatawan asing dibandingkan dengan 13 *gateway* lainnya yang sudah ditetapkan oleh Departemen Pariwisata dan Budaya di Indonesia. Kota Batam merupakan sebuah pulau terbesar dari 329 yang ada di wilayah kota Batam, hal ini menjadikan kota Batam sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan, Kota Batam juga menjadi salah satu pusat pariwisata yang menjadi perhatian wisatawan lokal maupun asing di Indonesia. Kota Batam menawarkan berbagai hal yang dapat dikembangkan menjadi potensi pariwisata yang layak untuk di pasarkan kepada umum. Maka dari itu kota Batam menjadi salah satu penyumbang angka masuknya turis terbesar setelah Bali dan Jakarta dalam kemajuannya di bidang pariwisata.

Kota Batam menjadi salah satu tujuan pariwisata yang banyak mendapat kunjungan dari wisatawan Indonesia sendiri maupun dari luar negeri, berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah antara lain wisata *M.I.C.E* “*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition,*” belanja, olahraga, sejarah religi, kuliner, bahari, wisata ke berbagai hiburan-hiburan lainnya. Tujuan lain pengunjung yang datang ke kota Batam hanya sebagai tempat singgah untuk berwisata ke negara Malaysia dan Singapura, ini menjadi sebuah peluang kota Batam untuk memanfaatkan wisatawan yang bersinggah tersebut dengan mengenalkan pariwisata kota Batam dan menunjukkan bahwa wisata di kota Batam juga tidak kalah menariknya di bandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia dan negara tetangga Singapura maupun Malaysia.

B. Profil Kota Gimje

Kota Gimje adalah salah satu bagian Kota di daerah Joella Utara, yang terletak di dataran yang besar di Korea Selatan. Kota Gimje telah di budidayakan sejak zaman kuno, saat bangsa-bangsa pada masa awal mulai tahun 200. Diawali dari kerajaan Baekje yang memulai menginvasi dan menggabungkan beberapa negara Mahan Kecil pada tahun ke-13 masa pemerintahan raja Onjo. Pada dinasti Joseon, Kota Gimje pertama kali muncul pada tahun 1466 ketika Sejo memerintah. Beliau mempromosikan Kota Gimje ke daerah independen. Pada tahun 1628, Gwanghawgun menggabungkan distrik terdekat dari Distrik Mangyeong menjadi Kabupaten Gimje. Pada saat kerajaan Baekje diruntuhkan oleh kerajaan Tang dan Silla, pada saat itu kerajaan Silla beserta Tang sepakat untuk

mengubah Kabupaten Gimje menjadi Kota Gimje. Kota Gimje pada saat itu sudah terkenal memiliki hasil tani yang melimpah dan kawasan Kota Gimje adalah kawasan yang terbaik untuk menanam padi dari kawasan yang ada di Korea Selatan²³.

C. Pengertian Kerjasama Sister City

Secara historis, tentang konsep kota kembar (*Sister City*) berawal dari munculnya *Municipal International Cooperation* (MIC) yang merupakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih yang berupa pemerintah kota, distrik, provinsi, atau negara bagian²⁴. Konsep *Sister City* mulai di kembangkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1950-an, konsep *Sister City* ini dilegalkan dengan adanya dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Elsenhower, yang mewujudkan dengan protokol²⁵. Selanjutnya konsep ini banyak dipraktikkan di berbagai negara, termasuk negara Indonesia yang beberapa dari daerahnya banyak mengadopsi konsep kerjasama *Sister City*, banyak perubahan setelah terjadinya perubahan system pemerintah dari desentralistik pasca Orde Baru. Era otonomi daerah telah menyediakan momentum tepat bagi daerah untuk memaksimalkan segenap potensi sumberdaya yang mereka miliki secara lebih leluasa. Hal ini mengacu pada surat edaran Menteri

²³ Kegiatan festival di Kota Gimje.

<http://www.gimje.go.kr/foreign/english/sub1/sub1.jsp> diakses pada 14 Desember 2018

²⁴ Rumengan J., “Prespektif Hukum dan Ekonomi atas kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 6, No.2, 2009

²⁵ Sinaga, O., *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerjasama Internasional* (Bandung: Lepsindo, 2010) hlm. 35

Dalam Negeri Nomor 193/1652/POUD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.

Jalinan kerjasama biasanya berawal dari kesepakatan yang terjadi antar kepala daerah, dan karena bersifat *top-down* atau sebaliknya melalui proses yang bersifat *bottom-up*, dimana terdapat kelompok masyarakat, akademisi, kelompok profesi tertentu berinisiasif membentuk kerjasama *Sister City* dan mengajukan secara resmi kepada kepala daerah. Sementara ketertarikan yang menjadi dasar dari kerjasama tersebut juga bias terjadi karenanya memiliki akar budaya yang sama, menyelenggarakan perayaan yang memiliki akar budaya yang memiliki tema sentral yang mirip, maupun karena intensitas pertemuan kedua komunitas cukup tinggi. Secara umum, tujuan ideal terjalannya kerjasama *Sister City* relatif akan lebih mudah tercapai ketika kedua kota atau daerah yang memutuskan untuk melakukan kerjasama tersebut dalam aspek budaya, karakteristik populasi, serta arah meningkatkan pembangunan wilayahnya.

Tahapan resmi penyusunan kerjasama *sister city* dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut²⁶:

1. Perencanaan, yang merupakan tahapan persiapan *intern* pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja yang akan dijadikan fokus kerjasama. Termasuk

²⁶ Ali Mukti, Takdir, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia (Yogyakarta: The Phinsi Press, 2013) hlm. 193-194

dalam tahap ini adalah menentukan calon-calon potensial sebagai partner kerjasama.

2. Tahap komunikasi dan penyusunan *draft Memorandum of Understanding* (MoU). Materi-materi kerjasama yang telah disiapkan pada tahap perencanaan secara garis besar dituangkan dalam *draft* MoU yang disusun bersama.
3. Mengajukan persetujuan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah local di luar negeri ke Kementrian Dalam Negeri termasuk materi dalam *draft* MoU beserta rencana detail kerjasama tersebut.
4. Pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan DPRD.
5. Tahap penandatanganan kerjasama *sister city* setelah mendapat persetujuan DPRD.

Dalam pelaksanaan kerjasama *sister city* seperti yang dikatakan oleh Sinaga, pihak-pihak yang bekerjasama yaitu pemerintah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut²⁷. *Pertama*, membentuk kekuatan yang besar, dalam artian menyatukan kekuatan atau berkoalisi dalam menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit dibandingkan kalau harus menangani permasalahan sendiri. *Kedua*, pihak-pihak yang bekerjasama juga dapat mencapai kemajuan yang lebih besar, seperti masing-masing pihak bertukar pikiran dalam keterampilan dan infomasi, misalnya daerah yang satu akan belajar dalam bidang yang dikuasai oleh rekan kerjasamanya. Setiap daerah yang terlibat akan berusaha dalam mengoptimalkan sumber daya masing-masing daerahnya dalam kerjasama *sister city* ini. *Ketiga*, pihak-pihak yang bekerjasama dapat

²⁷ Ali Mukti, Takdir, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia (Yogyakarta: The Phinsi Press,2013) hlm. 29

lebih berdaya karena masing-masing pihak yang terlibat kerjasama lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya. *Keempat*, masing-masing pihak yang bekerjasama dapat mencegah konflik. *Kelima*, masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang disepakati dalam kerjasamanya. Dengan kerjasama tersebut masing-masing pihak memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati rekannya dan setia dalam memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.

Kerjasama *sister city* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah;
2. Saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan pembangunan dalam bidang yang disepakati untuk bekerjasama;
3. Mendorong tumbuhnya peran aktif pemerintah daerah, kelompok sosial dan masyarakat itu sendiri;
4. Mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah;
5. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak;
6. Tukar menukar informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan dalam rangka menambah wawasan kebudayaan daerah.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan kerjasama *sister city* diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan

kerjasama tersebut. Menurut Sinaga, beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pratisipasif, efisiensi, efektivitas, consensus, saling menguntungkan²⁸.

Adapun landasan kerjasama *sister city* didasarkan bahwa kedua kota tersebut saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama dalam memajukan sektor-sektor yang ditetapkan dalam skema kerjasama. Namun karakteristik dan potensi wilayah yang sama, justru dapat melemahkan kekuatan dalam kerjasama *sister city* yang telah disepakati bersama, sebab apabila dua daerah memiliki kesamaan potensi daerah yang dijadikan sebagai ikon secara bersama-sama, maka tujuan dari bentuk kerjasama yang dibangun akan lebih sulit tercapai karena cenderung akan terjadi kompetisi dan bukan menjadi kerjasama dalam artian sesungguhnya, seperti halnya dengan kerjasama *sister city* yang pernah dilakukan Kota Batam dengan Kota Shen zen.

Supaya tereujudnya kebijakan *one door policy* dalam hubungan dan kerjasama luar negeri Indonesia di samping dengan adanya undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai Landasan hukumnya. Adapun bentuk antisipasi lain dari timbulnya masalah dalam pelaksanaan kerjasama antara daerah dan pihak asing. Sebagaimana kerjasama yang dimaksud dan dipandang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maka kerjasama tersebut dapat dijalankan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri nomor

²⁸ Op cit, hlm. 26-28.

09/A/KP/XII/2006/01, pada bagian lampiran terkait dan tujuan yang menjelaskan dari ditetapkannya peraturan tersebut yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, pasal 2 yaitu Efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum²⁹. Yakni untuk memberi arah, membantu dan memfasilitasi daerah dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Adanya ketentuan yang cukup jelas maka terbuka peluang bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kerjasama internasional dengan negara-negara lain.

Pada sebelum terjadinya kerjasama *sister city* antara Kota Batam dengan Kota Gimje, Kota Batam pernah ada kerjasama *sister city* antar Batam dengan Shen Zen, padahal dari kesamaan struktur wilayah sudah mempunyai *basic* yang sama yaitu sama-sama kota industri. Akan tetapi kerjasama *sister city* ini gagal dikarenakan tidak saling mendukung dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Dari kerjasama Shen Zen dengan Batam lebih menguntungkan Shen Zen, pada tahun 2011 dengan berhasilnya Shen Zen mendapatkan penghasilan US\$114,5

²⁹ Zulkifli, "KERJASAMA EKONOMI INTERNSIONAL SEBAGAI SOLUSI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.3 No.2 Juli 2014

miliar dan memiliki pendapatan per-kapita US\$ 13,200³⁰. Sedangkan kota Batam yang saat itu tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Shen Zen yang belajar dari Batam dan mereka berhasil, akan tetapi kota Batam ketinggalan jauh. itu berasal dari iklim investasi dari kota Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menyulitkan investor asing berupa kesulitan dalam birokrasi yang membuat banyaknya pengeluaran dana sehingga merugikan pihak investor yang membangun industrinya di kota Batam.

Kegagalan tersebut tetap tidak menghalangi kota Batam dalam menjalin kerjasama *sister city* lagi. Dibuktikan dengan dilanjutkannya kedatangan perwakilan dari kota Gimje Seo Sung Heo yang mendatangi kota Batam dan menemui perwakilan dari pihak kota Batam pada bulan Agustus 2011 lalu menjadi tanda keseriusan Gimje dalam hal kerjasama *sister city* dengan kota Batam. Setelah pertemuan tersebut mereka menambah akan melakukan kerjasama dalam lima bidang, yaitu pariwisata, industri dan perdagangan, investasi, pendidikan dan pertanian³¹.

Sementara itu dari tim pendahulu *sister city* yang diketuai oleh KADIN kota Batam pada saat itu (Kamar Dagang dan Industri) Nada Faza Soraya, mengungkapkan kalau dari kedua belah pihak sepakat untuk memfokuskan

³⁰ Hasil dari kerjasama sebelumnya yang tidak menguntungkan kota Batam. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3164021/banyak-negara-belajar-dari-batam-dan-berhasil-tapi-batam-malah-ketinggalan> diakses pada tanggal 18 Februari 2017.

³¹ Awal mulainya kerjasama dengan Kota Gimje. <http://kepri.antaranews.com/berita/17979/gimje-bahas-sister-city-dengan-batam> diakses pd tgl 29 Januari 2017

kerjasamanya untuk meningkatkan dibidang agrikultur dan manufaktur industri. Masih ada banyak hal yang kemungkinan kerjasama *sister city* ini menjadi sebuah rencana dan upaya dari masing-masing pihak untuk sebuah tujuan dalam pencapaian sebuah kepentingan-kepentingan dari pemerintah kedua belah pihak. Karena dari kedua belah pihak memiliki apa yang diinginkan dari satu sama lain. Keduanya berusaha mempersatukan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam atau paling tidak membuatnya bisa saling sesuai atau keduanya berusaha membuat kepentingan-kepentingan yang unggul atas yang lainnya. Lantas mengapa Kota Batam tetap ingin menjalankan kerjasama *sister city* lagi dalam ranah bidang yang sama dengan kerjasama yang pernah dilakukan? Faktor apa yang mendukung terjadinya kerjasama *sister city* antara Kota Batam dengan Kota Gimje?